KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat, begitupula dengan proyeksi kedepannya. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 adalah merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Renja Kecamatan Maritengngae masih memerlukan kesempurnaan di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap Renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pangkajene, 05 Agustus 2024
CAMAT MARITENGGAE

ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH, M.Si

NIP: 19850419 200312 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	31
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	33
BAB V. PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara simultan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan di masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bersama. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Maritengngae mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistimatis, sinergis dan komprehensif sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikannya, secara fungsional Kecamatan Maritengngae dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan

sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun ke depan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Maritengngae. Seajar dengan itu, muatan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Renja Kecamatan Maritengngae tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Renstra Kecamatan Maritengngae tahun 2024 – 2026 yang merupakan perencanaan satu periode (3 tahun) ke dalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistimatis Renja Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri

atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mencakup Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari dua Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, telah mencapai realisasi Renja 2023 sebesar 100% dari target sebesar 100% dan belum ada realisasi s/d tahun 2024 dari target sebesar 100%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan serta Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, telah mencapai realisasi Renja 2023 sebesar 100% dari target sebesar 100% dan realisasi s/d tahun 2024 sebesar 8,67% dari target sebesar 100%.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencakup Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari tiga Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, serta Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum, telah mencapai realisasi Renja 2023 sebesar 100% dari target sebesar 100% dan belum ada realisasi s/d tahun 2024 dari target sebesar 100%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, telah mencapai realisasi Renja 2023 sebesar 97% dari target sebesar 100% dan realisasi s/d tahun 2024 sebesar 16,50% dari target sebesar 100%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencakup Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, telah mencapai realisasi Renja 2023 sebesar 0% dari target sebesar 0% dan realisasi s/d tahun 2024 sebesar 9,41% dari target sebesar 100%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2024 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 29.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur, kelurahan tentang kebijakan pemerintah kabupaten;
3. Terlambatnya proses pencairan anggaran program kegiatan yang terkait;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Maritengngae, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Maritengngae berhasil di observasi dan dihimpun fenomenanya sebagai kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng

Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
3. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.
4. Peningkatan akses ketetapan waktu dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

TABEL TC-29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2024		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2024) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024		CAT.
						TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12
7												
7												
7	.1	.2										
7	.1	.2	204	0								
7	.1	.2	204	.2								
7	.1	.2	204	.3								

7	.1	.5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	-	100	-	-	100	33	8	
7	.1	.5	201	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	0	0	0	0	100	33	8	
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	Dokumen	-	-	-	-	2	1	8	
7	.1	.3	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	87	100	100	100	100	96	24	
7	.1	.3	201	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	100	100	100	100	100	100	25	
7	.1	.3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	1	1	1	100	5	2	12	
7	.1	.3	.202	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%	74	100	84	84	100	86	22	
7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	11	23	18	78	21	17	20	
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210	Pokmas/Ormas	12	1.652	1.208	73	210	477	57	

7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	Laporan	7	7	7	100	7	7	25	
7	.1	.6	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	100	100	100	100	100	25	
7	.1	.6	.201	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	100	100	100	100	100	25	
7	.1	.6	.201	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	Dokumen	5	5	5	100	5	5	25	
7	.1	.6	.201	.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	Dokumen	5	5	5	100	5	5	25	
7	.1	.6	.201	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen	5	5	5	100	5	5	25	
X	XX	.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	55	100	-	-	100	52	13	
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	-	-	-	-	100	33	8	
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	-	-	-	-	3	1	8	

X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	-	-	-	3	1	8		
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	-	-	-	3	1	8		
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	-	-	-	3	1	8		
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	-	-	-	3	1	8		
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	Dokumen	-	-	-	3	1	8		
X	XX	.1	.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100	100	25		
X	XX	.1	.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	812	Bulan	14	14	14	100	812	280	9	
X	XX	.1	.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	99	100	60	60	100	86	22	
X	XX	.1	.206	.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8	Paket	3	1	1	100	8	4	13	
X	XX	.1	.206	##	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8	Paket	4	95	48	51	8	20	63	

#	#	#	###	.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8	Paket	0	0	0	0	8	3	8	
X	XX	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	8	Paket	4	11.457	11.457	100	8	3.823	11947	
X	XX	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	8	Laporan	12	12	11	92	8	10	32	
X	XX	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8	Laporan	11	55	9	16	8	9	29	
X	XX	1	.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	-	100	100	100	100	67	17	
X	XX	1	.207	.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	16	Unit	-	1	1	100	16	6	9	
X	XX	1	.207	.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	24	Unit	-	2	2	100	24	9	9	
X	XX	.1	.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	96	100	97	97	100	98	24	
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	8	Laporan	12	850	850	100	8	290	906	
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	8	Laporan	12	12	11	92	8	10	32	
X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8	Laporan	12	12	12	100	8	11	33	
X	XX	.1	.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	100	%	36	100	50	50	100	62	16	

X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16	Unit	12	35	11	31	16	13	20	
X	XX	.1	.209	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16	Unit	11	14	14	100	16	14	21	
X	XX	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3	Unit	4	6	4	67	3	4	31	
X	XX	.1	.209	.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3	Unit	-	-	-	-	3	1	8	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara kelembagaan, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maritengngae diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Maritengngae tahun 2023 yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 81,25 dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 80
2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%
3. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%
4. Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%.

Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel TC 30.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari target yang diharapkan disebabkan indikator yang di survei memiliki nilai rata-rata pelayanan di atas nilai harapan.

TABEL TC-30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

No	Indikator Permendagri 86, 18, dan SPM	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Ket.
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0	0	0	0	74.264	75.862	79.925	81,25	82	84,22	85,67	87,75	
2	Predikat Nilai SAKIP	Kategori					C (32,26)	D (24,77)	C (45,35)	C (45,95)	C (46,12)	C (47,22)	C (49,32)	CC (50,42)	
3	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	%	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	%	0	0	0	0	0	78	80	81	81	100	100	100	
5	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi	%	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	IKK
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	0	0	0	0	0	72	73	74	74	78	83	85	IKK
8	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	IKK
9	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	0	0	0	0	0	0							

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan isu-isu strategis dalam memproyeksi kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan karena isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas organisasi.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Maritengngae bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Penanganan Stunting di tingkat Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan, maka kantor Kecamatan Maritengngae sebagai salah satu Perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng rappang melakukan pendataan akurat setiap masyarakat desa dan Kelurahan serta mengupayakan penanganan optimal untuk menurunkan angka stunting di lingkup Kecamatan.
- b) Penanganan Kemiskinan Ekstrim. Sehubungan dengan Inpres nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka Kecamatan Maritengngae berkoordinasi dengan tim Data P3KE untuk memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah/kantung kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem serta penyempurnaan basis data penetapan akurasi sasaran.
- c) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan

Company/Corporate Social Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- e) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- f) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan yang dijumpai antara lain:

1. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
3. Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten;
4. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
5. Kurangnya sarana prasarana yang memadai di beberapa bidang sehingga mengganggu dan pekerjaan tidak dapat selesai sesuai yang di inginkan;

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Maritengngae meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

2) Lingkungan Internal

Peluang:

1. Visi dan Misi organisasi yang jelas
2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan, dan
5. Adanya sarana dan prasarana.

Tantangan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai, dan
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan di tingkat Kecamatan.

3) Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Tantangan:

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Maritengngae berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat

Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Maritengngae.

Tahun anggaran 2025 Kantor Kecamatan Maritengngae merencanakan 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk mengukur kesesuaian Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel TC 31.

TABEL TC-31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN					6.925.705.560					6.925.705.560	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Maritenggae	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Maritenggae	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4.400.000	
1,1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Maritenggae	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	4.400.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Maritenggae	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	4.400.000	
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Maritenggae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	2.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Maritenggae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	2.200.000	
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Maritenggae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	2.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Maritenggae	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	2.200.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Maritenggae	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Maritenggae	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.000.000	

2,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50.000.000	
2.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	50.000.000	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	511.332.200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	511.332.200	
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	2.200.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	2.200.000	
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	2.200.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	2.200.000	
3,2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	509.132.200	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	509.132.200	
3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	378.532.200	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	378.532.200	

3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210	Pokmas/Ormas	128.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210	Pokmas/Ormas	128.400.000	
3.2.4	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	Laporan	2.200.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	Laporan	2.200.000	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		6.600.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		6.600.000	
4,1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		6.600.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		6.600.000	
4.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	2.200.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	2.200.000	
4.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	2.200.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	2.200.000	
4.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Dokumen	2.200.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Dokumen	2.200.000	

5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.353.373.360	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.353.373.360	
5,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.913.705.560	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.913.705.560	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maritengngae	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	854 Org/Bln	4.913.705.560	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maritengngae	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	854 Org/Bln	4.913.705.560	
5,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	182.596.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	182.596.500	
5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	10.000.000	
5.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	2.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	2.500.000	
5.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	8 Paket	30.271.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	8 Paket	30.271.500	
5.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	8 Laporan	29.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	8 Laporan	29.000.000	
5.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan	110.825.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan	110.825.000	
5,4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	143.637.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	143.637.800	

5.4.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket mebel yang diadakan	16	Unit	39.920.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Maritengngae	Jumlah paket mebel yang diadakan	16	Unit	39.920.000
5.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit	103.717.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit	103.717.800
5,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		648.476.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		648.476.500
5.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	8	Laporan	9.660.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	8	Laporan	9.660.000
5.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	8	Laporan	92.441.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	8	Laporan	92.441.000
5.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8	Laporan	546.375.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Maritengngae	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8	Laporan	546.375.500
5,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	100%		464.957.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	100%		464.957.000
5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16	Unit	54.575.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Maritengngae	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16	Unit	54.575.500
5.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16	Unit	20.035.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16	Unit	20.035.000

5.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	4	Unit	390.346.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Maritengngae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	4	Unit	390.346.500
-------	--	------------------------	---	---	------	-------------	--	------------------------	---	---	------	-------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Maritengngae pada tahun perencanaan 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah
2. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
4. Berkurangnya ketimpangan pendapatan
5. Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan
6. Meningkatnya mitigasi kebencanaan
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
8. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
9. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang maka semua hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Dan sehubungan bahwa Kecamatan Maritengngae bukanlah Perangkat Daerah pengemban delegasi yang menangani teknis pelaksana usulan masyarakat maka dalam Renja Kecamatan Maritengngae ini tidak terdapat usulan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel TC 32.

**TABEL TC-32 USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026**

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebagai bagian dari Musrenbangnas RKP 2024, turut dilaksanakan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang mempersiapkan penduduk Indonesia di 2045, melalui lima strategi. Pertama, Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang: Menyusun Kebijakan Keluarga Berencana Era Baru. Kedua, Mendorong Perpindahan Penduduk yang Merata: Transmigrasi Era Baru. Ketiga, Menunjang Penuaan Penduduk: Menyiapkan Lansia Mandiri. Keempat, Menutup Kesenjangan SDM melalui Persiapan Lebih Dini dan Afirmatif. Kelima, Pembangunan Wilayah yang Seimbang Antara Perdesaan dan Perkotaan.

3.1.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan:

1. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026
2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023
3. Prioritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun 2025

4. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
5. RT/RW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032;
6. Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke-2 (kedua) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 adalah ***“Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Transformasi Sosial dan Ekonomi”*** dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
2. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah
3. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan ekonomi
4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan
5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana
7. Peningkatan Aktivitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman

Perumusan isu strategis Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi Tahun 2024, arah kebijakan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan arah kebijakan RKP Tahun 2025 serta memperhatikan dinamika isu strategis global, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Maritengngae sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa

sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Maritengngae dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 81,55 persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2025 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 33.

**TABEL TC-33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KECAMATAN MARITENGGAE

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATA N PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026				
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1				2	3	4	5		6	7	8	9		10	
7					Unsur Kewilayahan										
7	1				Kecamatan										
7	.1	.2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Maritenggae	100%		4.400.000			100%		4.400.000
7	.1	.2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Maritenggae	100%		4.400.000			100%		4.400.000
7	.1	.2	204	.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Maritenggae	3	Laporan	2.200.000	PAD		5	Laporan	2.200.000
7	.1	.2	204	.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Maritenggae	3	Laporan	2.200.000	PAD		5	Laporan	2.200.000
7	.1	.5			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Maritenggae	100%		50.000.000			100%		50.000.000
7	.1	.5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Maritenggae	100%		50.000.000			100%		50.000.000

7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	2	Dokumen	50.000.000	PAD		2	Dokumen	50.000.000
7	.1	.3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengngae		100%	511.332.200				100%	524.500.000
7	.1	.3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengngae		100%	2.200.000				100%	2.200.000
7	.1	.3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	Kecamatan Maritengngae	5	Laporan	2.200.000	PAD		5	Laporan	2.200.000
7	.1	.3	.20 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Maritengngae		100%	509.132.200				100%	522.300.000
7	.1	.3	.20 2	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	21	Unit	378.532.200	DAU		21	Unit	390.900.000

7	.1	.3	.20 2	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel Pangkajene, Kel Lautang Benteng, Kel Lakessi, Kel Wala, Kel Rijang Pittu, Kel Majelling, Kel Majelling Wattang	21 0	Pokmas/Ormas	128.400.000	PAD		21 0	Pokmas/Ormas	129.200.000
7	.1	.3	.20 2	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	7	Laporan	2.200.000	PAD		7	Laporan	2.200.000
7	.1	.6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae		100%	6.600.000			100%	6.600.000	
7	.1	.6	.20 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Maritengngae		100%	6.600.000			100%	6.600.000	
7	.1	.6	.20 1	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.200.000	PAD		5	Dokumen	2.200.000
7	.1	.6	.20 1	.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.200.000	PAD		5	Dokumen	2.200.000

7	.1	.6	.20 1	.1 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.200.000	PAD	5	Dokumen	2.200.000
X	X X	. 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	100%		6.353.373.360		100%		6.466.147.800
X	X X	. 1	.20 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	100%		4.913.705.560		100%		5.000.000.000
X	XX	.1	.20 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Maritengngae	81 2	Org/Bln	4.913.705.560	DAU	89 6	Org/Bln	5.000.000.000
X	XX	.1	.20 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Maritengngae	100%		182.596.500		100%		182.696.500
X	XX	.1	.20 6	.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	10.000.000	DAU,PA D	8	Paket	10.000.000
X	XX	.1	.20 6	.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	2.500.000	DAU,PA D	8	Paket	2.500.000
X	XX	.1	.20 6	.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	30.271.500	DAU,PA D	8	Paket	30.271.500
X	XX	.1	.20 6	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	29.000.000	DAU,PA D	8	Laporan	29.100.000
X	XX	.1	.20 6	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	110.825.000	DAU,PA D	8	Laporan	110.825.000

X	XX	1	.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Maritengngae	100%		143.637.800			100%		159.137.800
X	XX	1	.207	.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	39.920.000	DAU,PA D		16	Unit	40.920.000
X	XX	1	.207	.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Maritengngae	24	Unit	103.717.800	DAU,PA D		16	Unit	111.217.800
X	XX	1	.207	.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Maritengngae	1	-	-	-		-	-	7.000.000
X	XX	.1	.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Maritengngae	100%		648.476.500			100%		650.852.000
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	9.660.000	DAU,PA D		8	Laporan	9.760.000
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	92.441.000	DAU,PA D		8	Laporan	93.441.000
X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	546.375.500	DAU,PA D		8	Laporan	547.651.000
X	XX	.1	.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	Kecamatan Maritengngae	100%		464.957.000			100%		473.461.500
X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharakan dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	54.575.500	DAU,PA D		16	Unit	54.759.500

X	XX	.1	.20 9	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	20.035.000	DAU,PA D		16	Unit	20.135.000
X	XX	.1	.20 9	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kecamatan Maritengngae	3	Unit	390.346.500	DAU,PA D		5	Unit	398.567.000
J U M L A H										6.925.705.560					7.051.647.800

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dibuat dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Maritengngae sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Maritengngae
4. Kecamatan Maritengngae berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Maritengngae Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maritengngae ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.